



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS TENAGA KERJA**

**2023**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG**



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR : 128.4/172 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam tahapan persiapan penyusunan Rencana Kerja, perangkat daerah menyusun rancangan keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang ;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- a. mempersiapkan, menghimpun, menyusun data yang berhubungan dengan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang;
- b. mensinkronkan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- c. merumuskan dan menyusun dokumen Rencana Renja (Renja) Tahun 2023.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 13 April 2022

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PEMALANG  
 NOMOR : 188.4/172 /TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
 DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG  
 TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Anggota	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Anggota	
5.	Kasubag Bina Program dan Keuangan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Anggota	
6.	Pengantar Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Najih Nur Fauzi, SE.
7.	Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Patrice Iwan Pribadi, SH.
8.	Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Arya Anggara Pranadhita, SH.
9.	Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Adrian Taufiq Jatiwijaya, SH.
10.	Kepala Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	
11.	Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	
13.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Munawaroh, SE
14.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Andreyan Saputra Pratama , A.Md
15.	Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	Tim Teknis	Kaprawi, A.Md

BUPATI PEMALANG,



MUKTI AGUNG WIBOWO



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2009 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6).

13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

#### Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
  - b. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang;
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pemalang;
  - d. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pemalang;
  - e. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
  - f. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
  - g. Rencana Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Pendudukan, KB, PP, dan PA Kabupaten Pemalang;

- h. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- i. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang;
- j. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang;
- k. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang;
- l. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
- m. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang;
- n. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pemalang;
- o. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pemalang;
- p. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- q. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
- r. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;
- s. Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang;
- t. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pemalang;
- u. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pemalang;
- v. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang;
- w. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;
- x. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang;
- y. Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pemalang;
- z. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang;
- aa. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang
- bb. Rencana Kerja Kecamatan Pemalang ;
- cc. Rencana Kerja Kecamatan Taman;
- dd. Rencana Kerja Kecamatan Petarukan;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Comal;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Ampelgading;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Bodeh;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Ulujami;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Bantarbolang;

- jj. Rencana Kerja Kecamatan Randudongkal;
  - kk. Rencana Kerja Kecamatan Warungpring;
  - ll. Rencana Kerja Kecamatan Moga;
  - mm. Rencana Kerja Kecamatan Pulosari;
  - nn. Rencana Kerja Kecamatan Belik;
  - oo. Rencana Kerja Kecamatan Watukumpul;
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 13 Oktober 2022

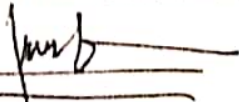
Plt. BUPATI PEMATANG  
WAKIL BUPATI,  
ttd  
cap  
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pematang  
pada tanggal 13 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMATANG  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA,  
ttd  
cap  
MOH. SIDIK

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2022 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMATANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MSi  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650218 199203 1 006



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR :050/249 /2022

TENTANG  
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 25 Tahun 2022 setiap Satuan Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
  - b. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang Jaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023.**

## Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang merupakan landasan dan pedoman Operasional bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang memuat Rencana Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi dengan formasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

## Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulis.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisi tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN berisi tentang :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD;
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## Pasal 3

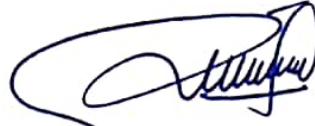
Isi, Uraian dan perincian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG



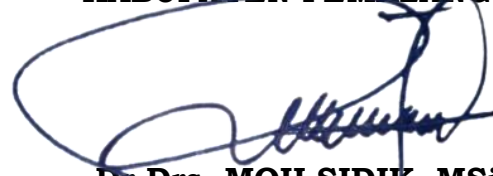
Dr. Drs. MOH. SIDIK, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196609231993031003

**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023.

Pemalang,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG**



**Dr.Drs. MOH.SIDIK, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660923 199303 1 003



## KATA PENGANTAR

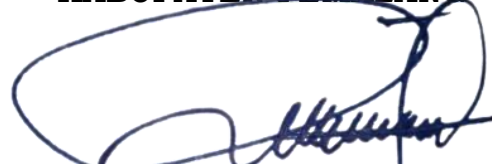
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat digunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, dapat digunakan sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dapat digunakan aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 ini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini.

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG**



**Dr. Drs. MOH. SIDIK, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660923 199303 1 003

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
BAB II .....	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU .....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang .....	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	18
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi .....	22
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD .....	23
2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	39
BAB III .....	42
TUJUAN DAN SASARAN .....	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah .....	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja .....	43
3.3 Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan .....	50
BAB IV .....	74
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....	74
BAB V .....	88
PENUTUP .....	88

**LAMPIRAN :**  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR..... TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2023

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan sebagai proses awal dari tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan mensyaratkan adanya perumusan alternatif keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi proses yang dibutuhkan karena keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung kepada kualitas konsep perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian sejauh mana ketersediaan sumber dana dan sumber daya aparatur dapat digunakan dalam mendukung program dan kegiatan dapat diprediksikan melalui asumsi yang mendasari konsepsi perencanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Rencana Kerja (Renja) SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja ( Renja ) merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja OPD merupakan salah satu tahapan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan konsepsi perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Renstra OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Tahun 2023 merupakan tahun kedua kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026. Oleh karena hal tersebut, dasar penyusunan Renja ini adalah visi dan misi Bupati Pemalang. Adapun Visi Bupati Pemalang adalah sebagai berikut:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN PEMALANG YANG ADIL,  
MAKMUR, AGAMIS DAN NGANGEN (AMAN)”**

Sedangkan Misi Bupati Pemalang antara lain :

- a. Mewujudkan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- b. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan bersih
- c. Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong
- d. Mewujudkan keterpaduan pembangunan perdesaan dan perkotaan
- e. Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berbasis pada potensi lokal
- f. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi, klasifikasi dan Nomenclatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2013 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Pematang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Renja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang dimaksudkan untuk:

1. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
2. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang dalam mencapai tujuan dengan cara

menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur selama 1 tahun.

4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Jaya untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam 1 tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan PD;
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Jaya;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021**

berisi tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN dan SASARAN

berisi tentang :

- 3.1. Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD,
- 3.3. Program, Kegiatan dan sub Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang**

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021, merupakan evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja tahun 2022 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian, dan realisasi program/kegiatan tahun 2021 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026, bahwa pada Tahun 2021, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 7.562.289.000,- yang terdiri dari 2 urusan, 6 Program 16 kegiatan dan 40 kegiatan. Pada tahun 2021 dari jumlah anggaran yang ada telah terserap sebesar Rp. 7.359.253.326,- (97,32%). Sisa anggaran sebesar Rp. 203.035.674,- berupa sisa gaji dan tunjangan

dan efisiensi anggaran. Capaian 97,32 % tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan ketransmigrasian telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

#### 1. Urusan wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No.	Program/Kegiatan	% realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2022	
		K	%.
1.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	86,40%	52,28%
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja		
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	77,30%	10,26%
4.	Program Program Penempatan Tenaga Kerja	134,29%	60,36%
5.	Program Hubungan Industrial	94,34%	19,96%

#### 2. Urusan Pilihan Ketransmigrasian

No.	Program/Kegiatan	% realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2021	
		K	%
1.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	0%	15,45%

Tabel 2.1

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG  
S/d Tahun 2022**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang**

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD Tahun 2021-2026)	Perkiraan arealisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2022	
				Target PD tahun 2021	Realisasi Renja PD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Urusan Tenaga Kerja								
2.07.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA</b>	Indeks RB Nilai SAKIP							
2.07.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>	100	100	100	100			
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	<b>6 dokumen</b>	<b>2</b>	<b>33</b>
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	<b>1 dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100	<b>1 dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	<b>1 dokumen</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	<b>1 dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## RENJA DISNAKER TAHUN 2023

2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	3	0
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	0	0	0	10 kegiatan	0	0
2.07.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu</b>	100	100	100	100	100		
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	3	25
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 SK	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan/dokumen	1	100
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 laporan	2 laporan	2 laporan	100	12 laporan/dokumen	3	25
2.07.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>	100	0	0	0	100		
2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	0	0	0	1 kegiatan/40 orang	0	0
2.07.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>	100	100	118,2	118,2	100		
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	25 jenis 6 buah	12	48
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	0	0
2.07.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	3	25
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	3	25

## RENJA DISNAKER TAHUN 2023

2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	4	33
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100	1 jenis	1	100
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 kali	60 kali	88 kali	147	60 kali	24	40
2.07.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 aplikasi	1 paket	1 paket	100	0	0	0
2.07.01.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran</b>	100	0	0	0	0		
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 unit	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.07.09	Pengadaan Gedung kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.07.11	Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Banguna Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 unit	0	0	0	0	0	0
2.07.01.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor</b>	100	100	96,4	96,4	100		
2.07.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan/ 6.000 surat	1.000 surat	940	94	0	0	0
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daa Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	12 bulan, 1 paket tambah daya listrik	12 bulan, 1 paket tambah daya listrik	100	12 bulan	3	25
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 orang	16 orang	16 orang	100	27 orang	27 orang	100
2.07.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>	100	100	152	152	100		

## RENJA DISNAKER TAHUN 2023

2.07.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit	37 unit	46 unit	124	29 unit	15	52
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	10 unit	21 unit	210	10 unit	5	50
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	2 unit	5 unit	167	1 unit	1	100
2.07.02	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja</b>	80	80	47,05	59,35	80		
2.07.02.2.01	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RKT)</b>	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumen rencana tenaga kerja yang telah disusun sesuai pedoman	2 kegiatan	1 kegt	1 kegt	100	0	0	0
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 dokumen	1 kegt	1 kegt	100	0	0	0
2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 dokumen	0	0	0	0	0	0
2.07.03	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b>	6,61	1,73	1,79	103,5	2,59		
		<b>Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja</b>	43,86	35,65	30, 15	84,57			
2.07.03.2.01	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi</b>	78,66	78,66	62,13	78,98	78,66		
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	220	128	128	100	64 orang	0	0
2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan sector swasta untuk penyediaan infrastruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelathan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 kali	0	0	0	0	0	0
2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelatihan Kerja Kab/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 paket	1 paket	1 paket	100	0	0	0
2.07.03.2.02	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja Swasta</b>	<b>Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi</b>	100	100	100	100	100		

## RENJA DISNAKER TAHUN 2023

2.07.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang DibinaLembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	38 LPKS	38 LPKS	38 LPKS	100	38 LPKS	0	0
2.07.03.2.03	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Persentase Lembaga pelatihan kerja swasta yang berizin</b>	100	100	100	100	100		
2.07.03.2.03.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja swasta yang terfasilitasi perizinannya	38 LPKS	38 LPKS	38 LPKS	100	10 LPKS	2	20
2.07.03.2.04	<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>Persentase Perusahaan kecil/UMKM yang meningkatkan produktivitasnya</b>	100	100	100	100	100		
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan kecil/UMKM	20 persh.kecil/UMKM	20 persh.kecil/UMKM	100	3 perusahaan	0	0
2.07.03.2.05	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktivitas.</b>	100	100	100	100	100		
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	38 peserta	20 peserta	20 peserta	100	0	0	0
2.07.04.2	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)</b>	69	44	67	152	49		
2.07.04.2.01	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang ditempatkan</b>	5.500 orang	5.500 orang	8.761 orang	159,3	15.000		
2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	0	0	0
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	15.000 orang	15.000 orang	15.806 orang	105,4	10.000	2397	23,97
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	2.340 orang	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	260 orang	0	0	0	0		
		Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan bidang pertanian mendukung mekanisme penempatan AKL. AKAD dan AKAN	20 orang	0	0	0	0		



RENJA DISNAKER TAHUN 2023

		Jumlah tenaga kerja yang terserap melalui padat kerja	1056 HOK	0	0	0	0		
		Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja	360 orang	220 orang	220 orang	100	80	40	50
2.07.04.2.02	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik</b>	100	100	100	100	0		
2.07.04.2.02.01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 orang	1 kegt	1 kegt	100	0	0	0
2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 kali	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.03	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja</b>	2.700 orang	2.700 orang	2.729 orang	101,1	0		
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilangkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 unit aplikasi	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1 unit aplikasi	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.03.03	Job Fair/bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	0	0	0
2.07.04.2.04	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Pekerja Migran Indonesia yang terlindungi</b>	100	0	0	0	0		
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja igran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	1 kegiatan	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1 kali	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	0	0	0	0	0
2.07.04.2.05	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/kota</b>	<b>Persentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing</b>	100	0	0	0	0	0	0

RENJA DISNAKER TAHUN 2023

2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA ang lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing.	3 perusahaan	0	0	0	0	0	0
2.07.05	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase terbinanya sarana Hubungan Industrial, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Perselisihan Hubungan Industrial</b>	<b>23,09</b>	<b>20</b>	<b>19,76</b>	<b>98,8</b>			
<b>2.07.05.2.01</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaana yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 perusahaan	5 perusahaan	5 perusahaan	100	5 perusahaan	0	0
		Jumlah perusahaan yang dimonev tentang pemenuhan kegiatan PP/PKB	12 perusahaan			0	5 perusahaan	5	5
2.07.05.2.01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 dokumen			0	0	0	0
		Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	30 orang			0	0	0	0
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	100			
<b>2.07.05.2.02</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kab/Kota</b>	<b>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Perusahaan yang ditangani dan Terbinanya Perusahaan yang mengikuti Jaminan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
2.07.05.2.02.01	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 kasus	0	0	0	0	0	0

## RENJA DISNAKER TAHUN 2023

2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan penutupan Perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	6 kasus	3 kasus	3 kasus	100	3 kasus	0	0
2.07.05.2.02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 organisasi	15 organisasi	15 organisasi	100			
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kab/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	16 kali	6 kali	6 kali	100	4 kali	0	0
2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 orang	50 orang	50 orang	100	60 orang	0	0
3.32.03	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase transmigran yang ditempatkan</b>	40	20	0	0			
<b>3.32.03.2.01</b>	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota</b>	<b>Jumlah penempatan Transmigran</b>	25 KK	25 KK	0	0			
3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 daerah	2 MOU	2 MOU	100	1 kali	0	0
3.32.03.2.01.02	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	25 KK	0	0	0	0	0	0
3.32.03.2.01.03	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 orang	0	0	0	0	0	0
3.32.03.2.01.04	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 peserta	0	0	0	0	0	0

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum terhadap pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2020 dapat kami sajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja**  
**Kabupaten Pemalang**

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Renstra SKPD Target					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (triwulan 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13	
1.	Persentase tingkat pengangguran terbuka			6,87	7,50	7,35	7,20	7,05	6,71		7,35	7,20	
2.	Persentase pengangguran yang ditangani				12,28	12,64	12,91	13,32	21,63		12,64	12,91	
3.	Indeks Ketenagakerjaan				21,91	24,21	26,47	28,74	29,51		24,21	26,47	
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		IKK		80	80	80	80			80	80	
5.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi		IKK		1,73	2,59	3,52	4,43	1,79		2,59	3,52	
6.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		IKK		35,65	38	40,59	43,43	30,15		38	40,59	
7.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		IKK		20	21,04	21,88	22,79	19,76		21,04	21,88	

RENJA DISNAKER TAHUN 2023

NO	Indikator	SPM / stand ar nasio nal	IKK	Renstra SKPD Target					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catata n Analisi s
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022 (triwulan 2)	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	11	12	13	
8.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota		IKK		44	49	54	59	67		49	54	
9.	Persentase transmigran yang ditempatkan		IKK		20	20	20	20	0		20	20	

Indikator persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 dari target 7,50 % terealisasi 6,71% yang artinya bahwa target TPT tercapai target penurunannya. Angka 6,71 % tersebut dihitung dari jumlah pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 43.288 orang dibagi jumlah Angkatan kerja sebesar 645.103 orang (BPS) realisasi capaian untuk Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2021 sebesar 110,5%. Hal ini disebabkan karena Angka TPT tahun 2021 sudah lebih baik dari angka TPT tahun yang lalu, jumlah pengangguran berkurang dikarenakan perusahaan-perusahaan mulai beroperasi kembali setelah adanya pandemi covid 19 setelah sebelumnya pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan sosial masyarakat sehingga aktivitas masyarakat sangat terbatas.

Sedangkan untuk indikator sasaran Indeks ketenagakerjaan pada tahun 2021 dari target 21,91% terealisasi sebesar 29,51 diperoleh dari prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (1,79%) ditambah prosentase % tenaga kerja yang ditempatkan (67%) ditambah % Hubungan Industri( 19,76%.

Prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ( 364 orang) dibagi jumlah tenaga kerja keseluruhan ( 21.448 orang), prosentase tenaga kerja yang ditempatkan diperoleh dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan 8.761 orang dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar 13.077 orang)

Indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.

Sedangkan Prioritas Pembangunan di Balai Latihan Kerja Kabupaten Pematang beruapa Pembangunan Ruang Tempat Uji Kompetensi (TUK) sudah bisa diselesaikan pada tahun 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pematang dalam rangka menekan angka pengangguran adalah dengan program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keahlian dan Instruktur BLK, Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja, Pengadaan sarana dan prasarana BLK, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja, Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta, dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyebarluasan

Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai, Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat, Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.

Salah satu cara menekan tingkat pengangguran yang tinggi adalah dengan cara meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan:

1. Meningkatkan mutu tenaga kerja. Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.
2. Memperluas kesempatan kerja Pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara : mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, Mendorong usaha-usaha kecil menengah, Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan, Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing
3. Memperluas pemerataan lapangan kerja Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.
4. Memperbaiki sistem pengupahan dengan pembinaan secara rutin terhadap perusahaan dan teguran kepada pelaku usaha yang belum menerapkan UMK.

Dalam bidang ketenagakerjaan permasalahan begitu luas dan kompleks tidak hanya masih adanya perusahaan yang belum memenuhi aturan ketenagakerjaan dan pelaku usaha yang belum menerapkan Upah Minimum Kabupaten, besarnya jumlah penganggur, terutama disebabkan rendahnya pendidikan dan ketrampilan, masih kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, disamping itu tidak semua dapat dipenuhi dikarenakan kualifikasi tenaga kerja belum sesuai dengan permintaan, masih rendahnya tingkat ketrampilan tenaga kerja pada sisi lain kita masih menghadapi masalah belum optimalnya balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta serta terbatasnya

instruktur yang bersertifikasi, belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Adapun Cara melindungi buruh yaitu : melalui Undang-undang ketenagakerjaan dimana buruh akan terlindungi secara hukum mulai dari jaminann pekerjaan yang layak, jaminan kesehatan, keselamatan kerja dan upah yang layak sampai jaminan sosial dan melalui serikat buruh/serikat pekerja.

Solusi yang dilakukan,melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pencari kerja untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten pemalang,dan pembinaan secara rutin terhadap perusahaan dan teguran kepada pelaku usaha yang belum menerapkan UMK.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan pemberdayaan dewan pengupahan

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuan transmigrasi adalah untuk mencapai persebaran penduduk yang lebih seimbang dan lebih merata diseluruh wilayah Indonesia.

Permasalahan ketransmigrasian adalah :

- Tahun 2021 berdasarkan Surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Surat dari Pemerintah Prop Jateng perihal perpindahan dan Penempatan Transmigrasi Tahun 2020 sehubungan dengan Corona Disease 2019 (COVID-2019) disampaikan bahwa untuk tahun 2021 tidak ada pemberangkatan transmigrasi sehingga capaian kinerja untuk indikator Jumlah KK yang ditempatkan untuk tahun 2021 tidak dapat terealisasi disamping itu karena adanya rasionalisasi anggaran untuk kegiatan transmigrasi beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan

Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Program Pembangaunan Kawasan Transmigrasi

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi**

Dalam bidang Ketenagakerjaan isu penting permasalahan yang ada antara lain :

1. Masih tingginya angka pengangguran disebabkan karena :
  - a. Rendahnya kompetensi tenaga kerja.
  - b. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja;



- c. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan;
- d. Belum semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek;
- e. Masih terdapat calon transmigran yang tidak/belum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi karena terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis didukung dengan pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Pematang Jaya yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis maka perlu ditindak lanjuti dengan suatu rencana tindak lanjut berupa program dan kegiatan yang nyata yang didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan disusunlah program-program sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Penempatan Tenaga Kerja
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

#### **2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2021-2026, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan.

Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk usulan kegiatan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan hanya tidak semua program dan kegiatan dapat terdani sesuai dengan usulan yang ada dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026, ada beberapa program prioritas dari Kepala Daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.. Untuk Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel 2.

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Kabupaten Pemalang**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				7.326.130	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>				7.326.130	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>5663</b>	<b>6.031.130</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Nilai SAKIP Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>5663</b>	<b>6.031.130</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>		<b>26.415</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD</b>		<b>26.415</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.211,5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	6.211,5	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.080	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3.080	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Semua Kab., Semua Kec.,	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	4.475	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	4.475	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
		Semua Kel.	Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	3 dokumen				Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	3 dokumen		
			Jumlah Dokumen RKAP-SKPD yang tersusun	1 dokumen				Jumlah Dokumen RKAP-SKPD yang tersusun	1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.425	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	3.425	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	4.325	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 dokumen	4.325	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 dokumen	3.974	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 dokumen	3.974	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	2.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	2.250	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu</b>		<b>5.103.564</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu</b>		<b>5.103.564</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab., Semua Kec.,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.007.247	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	5.007.247	

RENJA DISNAKER TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
		Semua Kel.									
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.855	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	1.855	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	1.989	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 dokumen	1.989	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan</b>			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	1.925	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 kegiatan	1.925	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	0	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 orang	0	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>284.665,5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</b>		<b>284.665,5</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kab., Semua Kec.,	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	6.918	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 bulan	6.918	

RENJA DISNAKER TAHUN 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
		Semua Kel.									
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 bulan		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	7,676,5	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 bulan	7,676,5	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	94.026,75	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	94.026,75	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	13.996	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	13.996	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun	7.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 tahun	7.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 kali	154.548	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 kali	154.548	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 unit	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 unit	-	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran</b>		<b>0</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran</b>		<b>0</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	<b>Daerah</b>					<b>Pemerintah Daerah</b>					
	Pengadaan Mebel	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	0	Pengadaan Mebel	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	13 unit	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit	0	
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 jenis/ buah	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 jenis/ buah	0	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terbangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tercukupin ya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah tercukupin ya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
		bangunan lainnya									
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor</b>		<b>538.063</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor</b>		<b>538.063</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 surat	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 surat	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	147.775	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	147.775	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 orang/bulan	390.288	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 orang/bulan	390.288	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>		<b>168.970</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara</b>		<b>168.970</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 jenis/unit	70.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 jenis/unit	70.000	
	Pengadaan Mebel	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 jenis/unit	63.080	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 jenis/unit	63.080	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	35.890	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	35.890	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>	<b>80%</b>	<b>0</b>	
	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sesuai pedoman		<b>0</b>	<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sesuai pedoman		<b>0</b>	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 dokumen	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2 dokumen	0	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 dokumen	0	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	1 dokumen	0	
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,59 38	<b>425.000</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,59 38	<b>425.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		<b>375.000</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>		Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		<b>375.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	220 orang	375.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	220 orang	375.000	
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 kali		Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 kali		
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 paket	0	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1 paket	0	
	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi		<b>9.000</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi		<b>9.000</b>	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 LPKS	9.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	40 LPKS	9.000	
	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin		<b>6.000</b>	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>		Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin		<b>6.000</b>	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	40 LPKS	6.000	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	40 LPKS	6.000	
	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkatkan produktifitasnya		<b>35.000</b>	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>		Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkatkan produktifitasnya		<b>35.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan /UMKM	35.000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	40 perusahaan /UMKM	35.000	
	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas		<b>0</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas		<b>0</b>	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 peserta	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	40 peserta	0	
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota</b>	<b>49%</b>	<b>705.000</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>		<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota</b>	<b>49%</b>	<b>705.000</b>	
	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		<b>685.000</b>	<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		<b>685.000</b>	
	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 bulan	0	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 bulan	0	
	Pelayanan antar Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	15.000 orang	85.000	Pelayanan antar Kerja	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	15.000 orang	85.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	0	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 orang	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2340 orang	0	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2340 orang	0	
	Perluasan Kesempatan Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1056 HOK	620.000	Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	1056 HOK	620.000	
	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik		<b>0</b>	<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik		<b>0</b>	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 orang	0	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	20 orang	0	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 kali	0	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	30 kali	0	
	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja		<b>0</b>	<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>		Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja		<b>0</b>	
	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	1 kegiatan		Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja <i>Online</i>	1 kegiatan		
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	1 paket		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem <i>Online</i> (Karir Hub)	1 paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Job Fair/Bursa Kerja	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1 kegiatan	0	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	1 kegiatan	0	
	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi		<b>0</b>	<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi		<b>0</b>	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	0	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1 kali	0	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	1 kali	0	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	20 Orang	0	
	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	3 Perusahaan	<b>0</b>	<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	3 Perusahaan	<b>0</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	10 kali	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	10 kali	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</b>	<b>21,04</b>	<b>150.000</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>		<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</b>	<b>21,04</b>	<b>150.000</b>	
	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan		<b>45.600</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan		<b>45.600</b>	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 perusahaan	45.600	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	12 perusahaan	45.600	
			Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	12 perusahaan				Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	12 perusahaan		
	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 dokumen	0	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	1 dokumen	0	
			Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	30 orang				Jumlah pelaku usaha/pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	30 orang		
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 perusahaan	0	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Disnaker Kab. Pemalang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	20 perusahaan	0	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan upah minimum kabupaten	1 Kegiatan				Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan upah minimum kabupaten	1 Kegiatan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosenatse perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan social		<b>104.000</b>	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		Prosenatse perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan social		<b>104.000</b>	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 kasus		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 kasus		
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 kasus	22.400	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 kasus	22.400	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 organisasi	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	15 organisasi	0	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	16 kali	52.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	16 kali	52.000	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	50 org	30.000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan	Disnaker Kab. Pematang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan	50 org	30.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Fasilitas KesejahteraanPekerja					Fasilitas KesejahteraanPekerja		Pekerja			
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				160.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				160.000	
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase transmigran yang ditempatkan</b>	20%	15.000	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>		<b>Persentase transmigran yang ditempatkan</b>	20%	15.000	
	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah transmigran yang ditempatkan		15.000	<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah transmigran yang ditempatkan		15.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	15.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 kegiatan	15.000	
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	25 KK	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	25 KK	0	
	Penyuluhan Transmigrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 orang	0	Penyuluhan Transmigrasi	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	100 orang	0	
	Pelatihan Transmigrasi	Semua Kab., Semua Kec., Semua Kel.	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 peserta	0	Pelatihan Transmigrasi	Disnaker Kab. Pematang	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	25 peserta	0	



## **2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah adalah melalui Forum SKPD . Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrenbang Kecamatan dengan rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi semua persoalan di semua sektor. Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan daerah terdiri dari prioritas I dan 2 serta pokok pikiran DPRD. Prioritas 1 merupakan kegiatan hasil musrenbang yang jelas terdani. Matriks Kegiatan Hasil Musrenbang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Para Pemangku Kepentingan/SKPD/Unit Kerja Tahun 2021**  
**Kabupaten Pematang**

**Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja**

NO	USULAN AKHIR			OPD	Nama dan Kode Program	Nama dan kode Kegiatan	Nama dan kode Subkegiatan
	NAMA USULAN	VOLUME	ANGGARAN				
1	Pelatihan Tata Boga (Bakeray) untuk 20 Orang, Rp 35.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 2 (Desa Karangtalok)	20 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
2	Pelatihan Menjahit Untuk 20 Orang, Rp40.000.000 Hasil Musrenbang Kecamatan Ampelgading Nomor 6 (Desa Sidokare)	20 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
3	Pelatihan menjahit yang diikuti oleh 2 (dua) kelompok sebanyak 20 orang Rp.50.000.000,- di desa Sambeng dan Glandang	20 orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
4	Pelatihan Menjahit untuk 1 Kelompok (20 orang) dengan rencana biaya Rp.50.000.000,- (musrenbang Watukumpul 2022 01) (Gapura)	1 kelompok (20 Orang)	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
5	Pelatihan menjahit (Musrenbang Kecamatan Pulosari 2022-3 / Rp. 50.000.000,- / 20 orang) (Karangsari dan Nyalembeng)	20 orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
6	Pelatihan Menjahit untuk 20 Orang Rp 40.000.000,- (Desa Sokawangi Kecamatan Taman Musrenbangkec Non Fisik 01)	20 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
7	Pelatihan Menjahit Untuk 30 Orang Rp 30.000.000,- (Desa Wanarejan Utara	20 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan	Pelayanan Antar Kerja di Daerah	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)

RENJA DISNAKER TAHUN 2023

	Kecamatan Taman Non Fisik Musrenbangkec 02)				Tenaga Kerja (2.07.04)	Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	
8	Pelatihan perbengkelan las untuk 1 kelompok 16 orang dengan anggaran Rp.50.000.000 ( Musrenbangkec Warungpring 2022 01 ) (Cibuyur)	16 orang	50.000.000	DISNAKER	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Peatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)
9	Pelatihan Menjahit Desa Badak, sasaran 20 orang, anggaran Rp.47.000.000 (Musrenbang Kecamatan Belik Tahun 2021 Nomor urut 1) (Badak)	20 Orang	50.000.000	DISNAKER	Program Penempatan Tenaga Kerja (2.07.04)	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (2.07.04.2.01)	Perluasan Kesempatan Kerja (2.07.04.2.01.05)
10	Pelatihan Montir Mobil untuk peserta 20 orang Rp 50.000.000,00 (Musrenbang Kecamatan 3) (Pecangakan)	16 orang	50.000.000	DISNAKER	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Peatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)
11	Pelatihan Las Listrik untuk 16 orang di desa Klegen Rp.50.000.000,- (Musrenbang Kecamatan Comal 5) (Klegen)	16 orang	50.000.000	DISNAKER	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (2.07.03)	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi (2.07.03.2.01)	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Peatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi (2.07.03.2.01.01)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah**

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten Pemalang.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2023 diarahkan pada;

- Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
- Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
- Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
- Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum

Dalam Renstra Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 direncanakan ada delapan arah ke depan yang akan dilaksanakan

1. Mengembangkan pasar terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi millennial.
3. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan (Lembaga Khusus/Komunitas bagi kelompok berpendidikan rendah).
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja.
5. Penguatan Relevansi pendidikan dan dunia kerja baik dari kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana, metode pembelajaran hingga sertifikasi keahlian.
6. Meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.
8. Peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

Adapun tema dan prioritas pembangunan Tahun 2023 adalah **Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat didukung penguatan daya saing ekonomi, SDM dan infrastruktur**. Sedangkan Sasaran pembangunannya adalah :

➤ Pertumbuhan ekonomi	: <b>3,71%</b>
➤ Inflasi	: <b>2,36 %</b>
➤ Kemiskinan	: <b>15,39 %</b>
➤ Tingkat Pengangguran Terbuka	: <b>7,20%</b>

Dari prioritas tersebut dapat dicapai dengan sinergitas pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten serta masyarakat.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima)

tahun ke depan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Jaya untuk mencapai Misi yang ke 3 Bupati ” Mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong yaitu dengan :

1. Tujuan : Mengurangi jumlah pengangguran

Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi

No.	Permasalahan /Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
I.	<p>Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja</li> <li>2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja;</li> <li>3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan</li> <li>4. Tahun 2020 belum semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek;</li> <li>5. Masih terdapat calon transmigran yang tidak/belum</li> </ol>	1. Mengurangi jumlah pengangguran	Meningkatnya kinerja pelayanan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi	<p><b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;</b></p> <p><b>Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</li> </ol> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</li> <li>b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;</li> <li>c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;</li> <li>d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;</li> <li>e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;</li> <li>f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;</li> <li>g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</li> </ol>

	<p>diberangkatkan ke lokasi transmigrasi karena terbatasnya kuota transmigrasi yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</p>			<p>2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;  <b>Sub Kegiatan :</b>  a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;  b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;  c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD</p> <p>3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  <b>Sub Kegiatan :</b>  a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan  b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>4. Administrasi Umum Perangkat Daerah  <b>Sub Kegiatan :</b>  a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;  b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;  c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;  d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;  e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;  f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;</p>
--	--	--	--	---

				<p>g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;</p> <p>h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</p> <p>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>a. Pengadaan Mebel;</p> <p>b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</p> <p>c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya</p> <p>6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;</p> <p>b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;</p> <p>c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p><b>Sub Kegiatan :</b></p> <p>a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;</p> <p>b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</p> <p>c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p>
--	--	--	--	--



2. Tujuan : Mengurangi jumlah pengangguran

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran

No .	Permasalahan /Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
I.	Urusan Tenaga Kerja			
	<p>Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kompetensi tenaga kerja sampai dengan Tahun 2020 pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebesar 73,39%;</li> <li>2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja;</li> <li>3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan yang menerapkan aturan ketenagakerjaan tahun 2020 baru sebesar 19,04%;</li> <li>4. Tahun 2020 belum semua tenaga kerja mengikuti program jamsostek;</li> <li>5. Masih terdapat calon transmigran yang tidak/belum diberangkatkan ke lokasi transmigrasi karena terbatasnya kuota transmigrasi</li> </ol>	<p>Mengurangi jumlah pengangguran</p>	<p>Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran dan perlindungan tenaga kerja</p>	<p><b>II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</li> <li>b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</li> </ol> </li> </ol>

	<p>yang diberikan Pemerintah Pusat dan Provinsi.</p>			
				<p><b>III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</li> <li>b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota</li> </ol> </li> <li>2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;</li> </ol> </li> <li>3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;</li> </ol> </li> <li>4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</li> </ol> </li> <li>5. Pengukuran Produktivitas</li> </ol>

				<p>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</p>
				<p><b>IV. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b></p> <p>1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</p> <p>b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan</p> <p>c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan</p> <p>2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan</p>

				<p>yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi</p> <p>d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</p>
				<p><b>V. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b></p> <p>1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>b. Pemandangan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota</p> <p>c. Penyuluhan Transmigrasi</p> <p>d. Pelatihan Transmigrasi</p>

### 3.3 Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang diarahkan untuk peningkatan derajat sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang sejahtera,

maka program dan kegiatan prioritas daerah selain dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintah juga ditekankan pada upaya-upaya antara lain : Peningkatan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, penempatan tenaga kerja , peningkatan sarana BLK dan bursa kerja.

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ada perubahan pada nomenkatur program dan kegiatan.

Rencana program , Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ;

➤ **Urusan Tenaga Kerja:**

**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;**

Kegiatan :

**1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**

Sub Kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

**3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

**4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- h. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

**5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;**

- a. Pengadaan Mebel;
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya

**6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

**II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

**1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**

- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
- b. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

**III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

- 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**
  - a. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
  - b. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
  - c. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
- 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**
  - a. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**
  - a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi;
- 4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**
  - a. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
- 5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

#### **IV. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**

- 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
  - b. Pelayanan antar Kerja
  - c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
  - d. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
  - e. Perluasan Kesempatan Kerja
- 2. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi
  - b. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
- 3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**
  - a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
  - b. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
  - c. Job Fair/Bursa Kerja
- 4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**
  - a. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);

- b. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
- c. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

**5. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**V. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
- b. Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
- c. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

**2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
- d. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
- e. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

**VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**

**1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**



- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pemandahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyuluhan Transmigrasi
- d. Pelatihan Transmigrasi

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam tabel.

Tabel. 3.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Pemalang**

**Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
2	7												
2	7	1											
2	7	1	2.01										
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Disnaker Kab. Pemalang	3 dokumen	6.211,5	APBD		3 dokumen	25.000
2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	Disnaker Kab. Pemalang	3 dokumen	3.080	APBD		3 dokumen	6.140

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)		
2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	Disnaker Kab. Pematang	3 dokumen	4.475	APBD		3 dokumen	5.000
					Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD	3 dokumen		3 dokumen					
					Jumlah Dokumen RKAP-SKPD yang tersusun	1 dokumen		1 dokumen					
2	7	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	Disnaker Kab. Pematang	1 dokumen	3.000	APBD		1 dokumen	4.000
2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA	Disnaker Kab. Pematang	1 dokumen	3.425	APBD		1 dokumen	5.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
		SKPD											
2	7	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnaker Kab. Pematang	12 dokumen	3.974	APBD		12 dokumen	4.235
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Disnaker Kab. Pematang	12 dokumen	2.250	APBD		12 dokumen	7.500
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				5.011.091	<b>APBD</b>			5.049.420
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan	5.007,25	APBD		12 bulan	5.045.420
2	7	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SK penatausahaan keuangan yang tersusun	Disnaker Kab. Pematang	1 dokumen		APBD		1 dokumen	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Disnaker Kab. Pematang	1 dokumen	1.855	APBD		1 dokumen	2.000
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan /semest SKPD dan laporan koord penyusunan laporan keuangan bulanan/tiwulan/semeste SKPD	Disnaker Kab. Pematang	12 dokumen	1.989	APBD		12 dokumen	2.000
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>1.925</b>	<b>APBD</b>			<b>35.000</b>
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Disnaker Kab. Pematang	1 kegiatan	1.925	APBD		1 kegiatan	35.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disnaker Kab. Pematang	15 orang		APBD		15 orang	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				<b>284.665,50</b>	<b>APBD</b>			290.997
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan	6.918	APBD		12 bulan	7000
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan		APBD		12 bulan	
2	7	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan	7.676,50	APBD		12 bulan	7.500
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat Kantor, makanan dan minuman	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan		APBD		12 bulan	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
		yang tersedia dan peralatan kebersihan yang terpenuhi											
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan		APBD		12 bulan	
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan	Disnaker Kab. Pematang	1 tahun		APBD		1 tahun	
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan	Disnaker Kab. Pematang	70 kali		APBD		70 kali	
2	7	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah terbangunnya sistem informasi berbasis elektronik	Disnaker Kab. Pematang	1 unit		APBD		1 unit	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>APBD</b>			
2	7	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang terpenuhi	Disnaker Kab. Pematang	13 unit		APBD		13 unit	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	7	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpenuhi	Disnaker Kab. Pemalang	8 unit		APBD		8 unit	
2	7	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang terpenuhi	Disnaker Kab. Pemalang	10 jenis/buah		APBD		10 jenis/buah	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terbangunan							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah tercukupinya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya							
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>538.063</b>	<b>APBD</b>			<b>547.775</b>
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim dalam 12 Bulan	Disnaker Kab. Pemalang	12 surat		APBD		12 surat	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan	147.775	APBD		12 bulan	147.775
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Disnaker Kab. Pematang	15 orang/bulan	390.288	APBD		15 orang/bulan	400.000
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>168.970</b>	<b>APBD</b>			<b>173.408</b>
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Disnaker Kab. Pematang	29 jenis/unit	70.000	APBD		29 jenis/unit	70.000
2	7	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Disnaker Kab. Pematang	10 jenis/unit	63.080	APBD		10 jenis/unit	63.408
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Disnaker Kab. Pematang	3 unit	35.890	APBD		3 unit	40.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>		<b>80%</b>		<b>APBD</b>		<b>80%</b>	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	2.01		<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>				<b>APBD</b>				
2	7	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	Disnaker Kab. Pemasang	2 dokumen		APBD		2 dokumen	
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang tersusun	Disnaker Kab. Pemasang	1 dokumen		APBD		1 dokumen	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi</b>		<b>2,59</b>	<b>425.000</b>	<b>APBD</b>		<b>3,52</b>	<b>1.293.000</b>
						<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>		<b>38</b>				<b>40,59</b>	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	2.01		<b>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</b>	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi			<b>375.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.153.000</b>
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari	Jumlah Tenaga Kerj yang	Disnaker Kab.	220 orang	375.000	APBD		220 orang	1.153.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024										
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)									
										(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2	7	3	2.01	2	Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	mendapat pelatihan berbasis Kompetensi pada Tahun n	Pemalang										
	2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah terlaksanakannya koordinasi dan kerjasama dengan sektor swasta	Disnaker Kab. Pemalang	15 kali		APBD		15 kali					
	2	7	3	2.01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia	Disnaker Kab. Pemalang	1 paket		APBD		1 paket					
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	2.02			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>				<b>9.000</b>	<b>APBD</b>						<b>50.000</b>	
	2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	Disnaker Kab. Pemalang	40 LPKS	9.000	APBD		40 LPKS				50.000	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	2.03			<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>				<b>6.000</b>	APBD						<b>30.000</b>	
	2	7	3	2.03	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Disnaker Kab. Pemalang	40 LPKS	6.000	APBD		40 LPKS				30.000	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	2.04			<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>				<b>35.000</b>	<b>APBD</b>						<b>60.000</b>	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Disnaker Kab. Pematang	40 perusahaan/UMKM	35.000	APBD		40 perusahaan/UMKM	60.000
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	2.05		<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>APBD</b>			
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah peserta yang dilatih pengukuran produktivitas	Disnaker Kab. Pematang	40 peserta		APBD		40 peserta	
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota</b>		<b>49</b>	<b>705.000</b>	<b>APBD</b>		<b>54</b>	<b>1.050.000</b>
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	2.01		<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>705.000</b>	<b>APBD</b>			<b>1.050.000</b>
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	Disnaker Kab. Pematang	12 bulan	85.000	APBD		12 bulan	85.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah pencari kerja yang terlayani dengan baik	Disnaker Kab. Peralang	15.000 orang		APBD		15.000 orang	
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	Disnaker Kab. Peralang	2.340 orang		APBD		2.340 orang	
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan kerja	Disnaker Kab. Peralang	20 Orang		APBD		20 Orang	
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Disnaker Kab. Peralang	1056 HOK	620.000	APBD		1056 HOK	965.000
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	2.02		<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>APBD</b>			
2	7	4	2.02	1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumberdaya perizinan LPTKS yang terfasilitasi	Disnaker Kab. Peralang	20 orang		<b>APBD</b>		20 orang	
2	7	4	2.02	2	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dimonitoring dan dievaluasi	Disnaker Kab. Peralang	30 kali		APBD		30 kali	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	2.03		<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>					<b>APBD</b>		
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi informasi Pasar kerja online yang terpelihara	Disnaker Kab. Pemalang	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi informasi pasar kerja yang terbangun	Disnaker Kab. Pemalang	1 paket		APBD		1 paket
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah job fair/bursa kerja yang dilaksanakan	Disnaker Kab. Pemalang	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	2.04		<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>APBD</b>		
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) difasiliatsi	Disnaker Kab. Pemalang			APBD		
2	7	4	2.04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah LTSA yang dibentuk dan dikembangkan	Disnaker Kab. Pemalang	5 kali		APBD		5 kali
2	7	4	2.04	3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna penempatan yang mendapat pelatihan wirausaha baru	Disnaker Kab. Pemalang	1 kegiatan		APBD		1 kegiatan
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	2.05		<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu)</b>					<b>APBD</b>		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>													
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan penggunaan Tenaga Kerja Asing	Disnaker Kab. Pemalang	10 kali		APBD		10 kali	
2	7	5			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b>		21,04	150.000	APBD		21,88	365.000
2	7	5	2.01		<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				45.600	APBD			80.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					(8)		
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial yang terdaftar di WLKP Online	Disnaker Kab. Pemalang	12 perusahaan	45.600	APBD		12 perusahaan	80.000
					Jumlah Perusahaan Yang dimonev tentang pemenuhan ketentuan PP/PKB	12 perusahaan		12 perusahaan					
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	jumlah perjanjian kerjasama bagi perusahaan yang tercatat/didaftarkan	Disnaker Kab. Pemalang	1 dokumen	APBD			1 dokumen	
					Jumlah pelaku usaha / pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB		30 orang	30 orang					
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	1. Jumlah pendataan kepesertaan	Disnaker Kab. Pemalang	20 perusahaan	APBD			20 perusahaan	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
	Tenaga Kerja serta Pengupahan	jamsostek yang terlaksana											
		2. Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan upah minimum kabupaten											
<b>2</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2.02</b>		<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>104.400</b>	<b>APBD</b>				<b>285.000</b>
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pencegahan perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	Disnaker Kab. Pemalang	6 kasus		APBD		6 kasus	
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	Disnaker Kab. Pemalang	6 kasus	22.400	APBD		6 kasus	50.000
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat	Jumlah verifikasi dan pendataan organisasi pengusaha dan	Disnaker Kab. Pemalang	15 organisasi		APBD		15 organisasi	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
	Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	organisasi serikat buruh serta non afiliasi warga yang dilaksanakan											
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	Disnaker Kab. Pemalang	16 kali	52.000	APBD		16 kali	100.000
2	7	5	2.02	5	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi/bintek kepesertaan BPJS/jaminan sosial	Disnaker Kab. Pemalang	50 orang		APBD		160 orang	
<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>APBD</b>			
<b>3</b>	<b>32</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>				<b>15.000</b>	<b>APBD</b>			<b>70.000</b>
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Presentase Transmigran yang Ditempatkan</b>		<b>20%</b>	<b>15.000</b>	<b>APBD</b>		<b>20%</b>	70.000
<b>3</b>	<b>32</b>	<b>3</b>	2.01		<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>15.000</b>	<b>APBD</b>			<b>70.000</b>
3	32	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan	Disnaker Kab. Pemalang	2 kegiatan	15.000	APBD		2 kegiatan	70.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp. 000)				
										(1)	(2)	(3)	(4)
		transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota											
3	32	3	2.01	4	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang terseleksi untuk ditempatkan	Disnaker Kab. Pematang	25 KK		APBD		25 KK	
3	32	3	2.01	5	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan transmigran	Disnaker Kab. Pematang	100 orang		APBD		100 orang	
3	32	3	2.01	6	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	Disnaker Kab. Pematang	25 peserta		APBD		25 peserta	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026

Sesuai dengan pasal 273 (3) Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebagaimana tabel terlampir:

**Tabel. 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

NO	TUJUAN Renstra	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Tahun 2023 dan 2024				Lokasi
					2023		2024		
					Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Sakip/Indeks RB</b>					
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>26.415,50</b>		<b>56.875</b>	
			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>26.415,50</b>		<b>56.875</b>	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	6.211,50	6 dokumen	25.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA SKPD	1 dokumen	3.080	1 dokumen	6.140	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	1 dokumen	4.475	1 dokumen	5.000	
				Jumlah Dokumen	1 dokumen		1 dokumen		

				Evaluasi Kebijakan, Pelaksanaan Hasil Renstra OPD					
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKAP-SKPD yang tersusun	1 dokumen	3.080	1 dokumen	4.000	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	1 dokumen	3.000	1 dokumen	4.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD	1 dokumen	3.425	1 dokumen	5.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SPKD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	3.974	12 laporan	4.235	
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>5.011.091</b>		<b>5.049.420</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 orang/bulan	5.007.247	38 orang/bulan	5.045.420	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SK penatausahaan keuangan yang tersusun	1 dokumen		1 dokumen		

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1.855	1 laporan	2.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/s emesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/s emester SKPD	12 laporan	1.989	12 laporan	2.000	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>1.925</b>		<b>35.000</b>	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	40 orang	1.925	40 orang	35.000	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan dan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	15 orang		15 orang		
			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>284.665,50</b>		290.997	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan	6 paket	6.918	6 paket	7.000	

				bangunan kantor yang disediakan					
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan		12 bulan		
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	25 paket	7.676,50	25 paket	7.500	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	20 paket	94.026,75	20 paket	95.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang dan cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 paket	13.996	6 paket	13.997	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	7.500	1 dokumen	7.500	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	154.548,25	60 laporan	160.000	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah terbangunnya sistem informasi berbasis elektronik	1 unit		1 unit		
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>						
			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeler yang terpenuhi	13 unit		13 unit		
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya	8 unit		8 unit		



			yang terpenuhi					
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang terpenuhi	10 jenis/buah		10 jenis/buah		
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terbangunan					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah tercukupinya sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya					
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>538.063</b>		<b>547.775</b>	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 12 Bulan	12 surat		12 surat		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	147.775	12 laporan	147.775	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	390.288	12 laporan	400.000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>168.970</b>		<b>173.408</b>	
		Penyediaan Jasa	Jumlah kendaraan	29 unit	70.000	29 unit	70.000	

			Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinan					
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	63.080	10 unit	63.408	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	35.890	2 unit	40.000	
			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b>	<b>80%</b>		<b>80%</b>		
			<b>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>						
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah yang tersusun	2 dokumen		2 dokumen		
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro yang tersusun	1 dokumen		1 dokumen		
			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	<b>2,59</b>	<b>425.000</b>	<b>3,52</b>	<b>1.293.000</b>	
				<b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>	<b>38</b>		<b>40,59</b>		
			<b>Pelaksanaan berdasarkan Pelatihan Unit</b>	Prosentase pencari kerja yang		<b>375.000</b>		<b>1.153.000</b>	

			<b>Kompetensi</b>	mengikuti pelatihan berbasis kompetensi					
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi pada Tahun n	64 orang	375.000	64 orang	1.153.000	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah terlaksanakannya koordinasi dan kerjasama dengan sektor swasta	15 kali		15 kali		
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja yang tersedia	1 paket		1 paket		
			<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</b>			<b>9.000</b>		<b>50.000</b>	
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	40 LPKS	9.000	40 LPKS	50.000	
			<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>			<b>6.000</b>		<b>30.000</b>	
			Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	10 perizinan	6.000	10 perizinan	30.000	
			<b>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>			<b>35.000</b>		<b>60.000</b>	
			Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	3 perusahaan /UMKM	35.000	3 perusahaan /UMKM	60.000	
			<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>						

			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	jumlah peserta yang dilatih pengukuran produktivitas	40 peserta		40 peserta		
			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota</b>	<b>49</b>	<b>705.000</b>	<b>54</b>	<b>1.050.000</b>	
			<b>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>705.000</b>		<b>1.050.000</b>	
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	12 bulan		12 bulan		
			Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	15.000 orang	85.000	15.000 orang	85.000	
			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta penyuluhan dan bimbingan bagi pencari kerja	2.340 orang		2.340 orang		
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat pelatihan kerja	20 Orang		20 Orang		

			Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang diberdayakan melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	80 orang	620.000	80 orang	965.000	
			<b>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Sumberdaya perizinan LPTKS yang terfasilitasi	20 orang		20 orang		
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dimonitoring dan dievaluasi	30 kali		30 kali		
			<b>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>						
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi informasi Pasar kerja online yang terpelihara	1 kegiatan		1 kegiatan		
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah aplikasi informasi pasar kerja yang terbangun	1 paket		1 paket		
			Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah job fair/bursa kerja yang dilaksanakan	1 kegiatan		1 kegiatan		
			<b>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran	Jumlah calon pekerja migran Indonesia (CPMI) difasiliatsi					

			Indonesia (PMI)						
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah LTSA yang dibentuk dan dikembangkan	5 kali			5 kali	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purna penempatan yang mendapat pelatihan wirausaha baru	1 kegiatan			1 kegiatan	
			<b>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dimonitoring penggunaan Tenaga Kerja Asing	10 kali			10 kali	
			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).</b>	<b>21,04</b>	<b>150.000</b>		21,88	<b>365.000</b>
			<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>45.600</b>			<b>80.000</b>
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan	5 perusahaan	45.600		5 perusahaan	80.000

			hubungan industrial yang terdaftar di WLKP Online				
			Jumlah Perusahaan Yang dimonev tentang pemenuhan ketentuan PP/PKB	12 perusahaan		12 perusahaan	
			Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	jumlah perjanjian kerjasama bagi perusahaan yang tercatat/didaftarkan	1 dokumen	1 dokumen	
			Jumlah pelaku usaha / pengusaha yang mengikuti bimtek pembuatan PP/PKB	30 orang		30 orang	
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1. Jumlah pendataan kepesertaan jamsostek yang terlaksana 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan penetapan upah minimum kabupaten	20 perusahaan	20 perusahaan	
			<b>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>104.400</b>	<b>285.000</b>	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pencegahan perselisihan HI, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan	6 kasus	6 kasus	

			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perkara perselisihan yang terselesaikan	3 perkara	22.400	3 perkara	50.000	
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah verifikasi dan pendataan organisasi pengusaha dan organisasi serikat buruh serta non afiliasi warga yang dilaksanakan	15 organisasi		15 organisasi		
				Jumlah LKS Tripartit yang dibina	4 LKS	52.000	4 LKS	100.000	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	30.000	60 orang	135.000	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>			<b>15.000</b>		<b>70.000</b>	
			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Presentase Transmigran yang Ditempatkan</b>	<b>20%</b>	<b>15.000</b>	<b>20%</b>	70.000	
			<b>Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>15.000</b>		<b>70.000</b>	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan	1 Laporan		1 Laporan		



				transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kab/Kota					
			Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang terseleksi untuk ditempatkan	25 KK		25 KK		
			Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah masyarakat yang mendapat penyuluhan transmigran	100 Orang		100 Orang		
			Pelatihan Transmigrasi	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan	25 Peserta		25 Peserta		

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2022 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2023.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

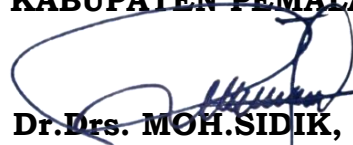
1. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian Kinerja dalam Rencana Kerja 2023 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja (Rencana Kerja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.
3. Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan yang ada dalam Renja.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja 2023 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang 2023.

Pemalang,

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN PEMALANG**



**Dr. Drs. MOH. SIDIK, MSi**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660923 1 99303 1 003 1 003